

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDIA TERKAIT ISU PERBATASAN MELALUI PENANDATANGAN BORDER DEFENCE COOPERATION AGREEMENT DENGAN TIONGKOK TAHUN 2013

Arfin Sudirman¹, Yusa Djuyandi², Yoni Yolanda Sinyal³

^{1,3} Hubungan Internasional, FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung

² Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung

Email: arfin.sudirman@unpad.ac.id ¹; yusa.djuyandi@unpad.ac.id ²

Submitted: 02-05-2023; Accepted: 16-06-2023; Published : 27-06-2023

ABSTRAK

Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perbatasan yang terjadi antara India dan Tiongkok, dimana permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan terkait letak dari garis perbatasan. Terdapat dua area yang menjadi letak dari sengketa, yaitu Aksai Chin di bagian barat dan Arunachal Pradesh di bagian timur. Meskipun permasalahan masih terjadi, kedua negara sudah berusaha untuk melakukan tandatangan di beberapa perjanjian internasional tentang isu sengketa perbatasan ini. Selain itu, perjanjian terbaru yang ditandatangani kedua negara adalah Border Defence Cooperation Agreement (BDCA) di tahun 2013. Dengan menggunakan beberapa konsep Determinan Kebijakan Luar Negeri artikel ini menyimpulkan bahwasanya setiap konsep determinan tersebut memiliki variasi pengaruh bagi keputusan India untuk menandatangani BDCA, dikarenakan permasalahan perbatasan antara India dan Tiongkok belum bisa terselesaikan. Hal ini disebabkan mengingat di satu sisi, India masih berpegang teguh terhadap klaim yang ada di sepanjang perbatasan karena faktor keamanan.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri; Isu Perbatasan, India, Tiongkok

ABSTRACT

This article is motivated by border problems that occur between India and China, where these problems are caused by different views regarding the location of the border line. There are two areas where the dispute lies, namely Aksai Chin in the west and Arunachal Pradesh in the east. Even though the problems still occur, the two countries have attempted to sign several international agreements on the issue of this border dispute. In addition, the latest agreement signed by the two countries is the Border Defense Cooperation Agreement (BDCA) in 2013. By using several concepts of Foreign Policy Determinants, this article concludes that each of these determinant concepts has various influences on India's decision to sign the BDCA, because border issues between India and China cannot be resolved. This is due to the fact that, on the one hand, India still adheres to claims along the border due to security factors.

Keywords: Foreign Policy; Border Issues, India, China

PENDAHULUAN

Dalam membahas hubungan internasional, negara masih menjadi sesuatu yang relevan untuk menjadi subjek penelitian bagi para penstudinya. Negara merupakan suatu entitas berdaulat yang menjalankan hak dan wewenangnya untuk melakukan sesuatu hal kepada entitas yang berada di luar negaranya, dimana hal tersebut dilakukan melalui tindakan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan suatu pola perilaku yang dilakukan untuk dapat memenuhi kepentingan nasional yang dimiliki suatu negara, kemudian dilakukannya dengan menerapkan beberapa cara dan strategi, baik melalui cara koersif ataupun perdamaian.

Kemudian dalam membicarakan suatu negara, perbatasan menjadi sesuatu hal yang penting pula dikarenakan perbatasan menjadi suatu dasar dalam memahami kedaulatan suatu negara serta berdampak bagaimana antara satu negara dan lainnya berinteraksi satu sama lain. Membicarakan perbatasan, maka India menjadi negara yang relevan dalam hal ini karena India memiliki perbatasan dengan banyak negara tetangganya. India memiliki perbatasan tanah sepanjang 15,106.7 km dengan beberapa negara yaitu yaitu Bangladesh (4,096.7 km); Tiongkok (3,488 km); Pakistan (3,323 km); Nepal (1,751 km); Myanmar (1,643 km); Bhutan (699 km); dan Afghanistan (106 km) (Ministry of Home Affairs Government of India, 2016). Perbatasan dengan negara-negara tersebut tentunya bukan tanpa permasalahan, dan salah satu negara yang memiliki permasalahan perbatasan dengan India dan belum terselesaikan sampai saat ini adalah Tiongkok.

India dan Tiongkok memulai hubungan secara diplomatik pada 30 Desember 1949, dimana dengan ditandai dari pengakuan Perdana Menteri masa itu Jawaharlal Nehru terhadap pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Dan India pun menjadi negara non-sosialis pertama yang melakukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok (Li, 2010: 6). Hubungan diplomatik antara India dan Tiongkok diawali dengan keadaan sebagai negara tetangga yang memiliki hubungan baik. Dimana India melakukan pengakuan terhadap Tiongkok, kemudian mereka melakukan hubungan kerjasama diawali pada tahun 1950. Di awal hubungan diplomatik tersebut, India dan Tiongkok membentuk Panchsheel, yang berisikan lima prinsip bagi

hubungan kerjasama bilateral kedua negara. Panchsheel diumumkan dalam Pembukaan dari *Agreement on Trade and Intercourse between the Tibet Region of China and India* yang ditandatangani oleh masing-masing representasi dari Duta Besar India Nedyam Raghavan dan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Chang Han Fu pada 29 April 1954. Lima prinsip yang berada dalam perjanjian tersebut adalah: a) saling menghormati masing-masing wilayah dan kedaulatan; b) tidak melakukan serangan terhadap satu sama lain; c) tidak saling mencampuri urusan internal masing-masing negara; d) keadilan dan saling menguntungkan satu sama lain; e) hidup berdampingan secara damai (Sharma & Ghildial, 2014). Hubungan baik antara kedua negara pun mendapatkan julukan dengan *Hindi-Chini Bhai Bhai* yang memiliki arti bahwa India dan Tiongkok adalah bersaudara.

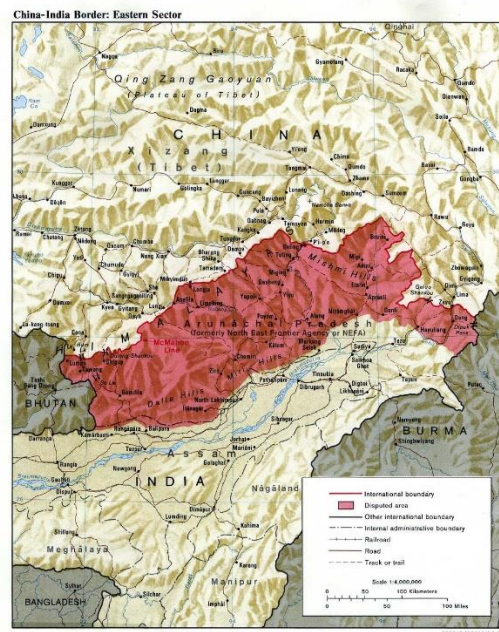
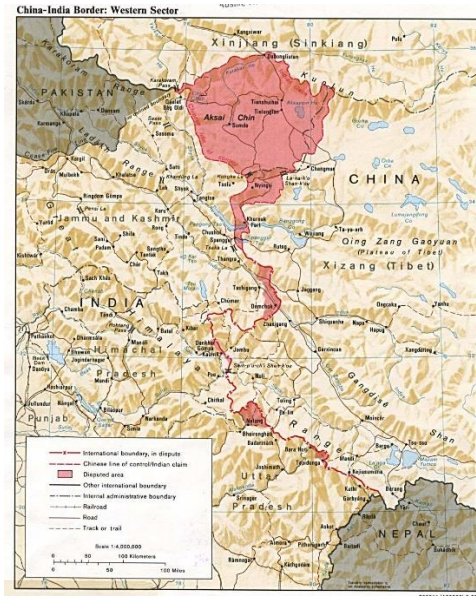
Kemudian membicarakan permasalahan perbatasan di antara keduanya dimulai jauh sebelum India merdeka di tahun 1947 dan sebelum Tiongkok merdeka di tahun 1949. Dimana permasalahan ini berasal dari Konferensi Simla yang dihadiri oleh beberapa perwakilan yakni delegasi Tibet, perwakilan dari Tiongkok dan sekretaris pemerintah India Britania, Henry McMahon di tahun 1913, dimana pada saat itu India masih berada di bawah koloni Inggris. Konferensi Simla merupakan konferensi yang membahas dua topik yaitu terkait perbatasan antara India Britania dengan Tibet. Dimana perjanjian tersebut kemudian disetujui dan dilakukan secara bilateral antara India Britania dan Tibet dikarenakan pemerintah pusat Tiongkok menolak perjanjian tersebut (Zhang & Li, 2013).

Di satu sisi, India memandang perbatasan antara kedua negara sudah diatur dan menjadi peninggalan koloni Inggris. Sedangkan, Tiongkok tidak melihat bahwa adanya garis perbatasan yang jelas, sehingga dibutuhkan kerjasama antara kedua negara untuk menentukan kembali garis perbatasan yang jelas (Li, 2010: 6-7). India menggunakan perspektif sejarah mengenai perbatasan yang ada, sedangkan Tiongkok melihat perbatasan tersebut dari perspektif politik dan strategis. Maksudnya adalah,

India menganggap bahwa perbatasan India-Tibet/Tiongkok di sektor barat didasarkan oleh tradisi dan sejarah yang ada, kemudian mengenai sektor timur adalah hasil dari Konferensi Simla pada tahun 1913-1914 antara India Britania dan Tibet. Tetapi Tiongkok memiliki pandangan lain akan hal ini. Pandangannya adalah bahwa perbatasan India-Tibet/Tiongkok tidak pernah ada di sektor barat, dan Garis McMahon yang dibentuk oleh India Britania dan Tibet di sektor timur tidak dapat diterima (Pardesi, 2012: 190-191).

Permasalahan perbatasan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pembagian perbatasan di antara kedua negara. Sebagaimana kedua negara tidak memiliki kesamaan akan perbatasan, maka garis perbatasan yang jelas pun belum secara sah terbentuk. Permasalahan pun mulai memasuki tahun 1960 ketika India memulai untuk mengimplementasikan *Forward Policy* di masa pemerintahan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru yang ditujukan untuk melindungi teritori India yang dianggap telah dimasuki oleh tentara Tiongkok dengan cara mengirimkan tentara India dan melakukan patroli perbatasan di area persengketaan. Kebijakan tersebut berdampak pada perang mengenai perbatasan dari bulan Oktober sampai November 1962 pada saat Tiongkok menyerang India di wilayah barat dan timur perbatasan, dengan posisi dimana India mendapatkan kekalahan dengan dilihat dari kemampuan militer yang dimiliki oleh masing-masing negara, dan dengan Tiongkok yang dikatakan menang dan dengan secara sepihak melakukan gencatan senjata dan penarikan diri dari tempat persengketaan di perbatasan (Malone & Mukherjee, 2010: 140-141).

Terdapat dua area utama terkait isu perbatasan antara India dan Tiongkok, yaitu di wilayah timur, dimana India menyebutnya dengan North East Frontier Agency (NEFA) yang kemudian menjadi Arunachal Pradesh pada tahun 1971 dengan besar wilayah 145,000 km² sedangkan Tiongkok menyebutnya dengan Tibet Selatan. Kemudian di wilayah Barat, disebut dengan Aksai Chin yang membatasi Kashmir, Xinjiang, dan Tibet dengan wilayah sebesar 34,000 km².



Permasalahan di perbatasan ini telah beberapa puluh tahun berakar di antara hubungan kedua negara, tetapi berbagai upaya telah dilakukan oleh India dan Tiongkok melalui melakukan pertemuan dan membentuk berbagai kerjasama dalam bentuk perjanjian internasional guna mengurangi tensi mengenai perbatasan. Seperti di tahun 1993, kedua negara membentuk suatu perjanjian *Agreement on Maintenance of Peace and Tranquility* di sepanjang *line of actual control* (LAC). Pertemuan yang menghasilkan perjanjian ini dikatakan menjadi suatu batu loncatan bagi hubungan militer antara kedua negara.

Kebijakan Luar Negeri India Terkait Isu Perbatasan Melalui Penandatanganan Border Defence Cooperation Agreement Dengan Tiongkok Tahun 2013
(Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, Yoni Yolanda Sinyal)

Dimana Menteri Pertahanan pada saat itu Sharad Pawar mengunjungi Tiongkok pada bulan Juli 1992, dan merupakan kunjungan pertama yang dilakukan Menteri Pertahanan India terhadap Tiongkok. Selama pertemuan tersebut dilakukan, pimpinan militer Tiongkok menekankan pada pentingnya dilakukan pengurangan terkait hal di perbatasan karena memakan biaya yang cukup tinggi. Dan pertemuan inipun menghasilkan perjanjian antara keduanya yang ditandatangani pada 7 September 1993 (Das, 2010: 109-110).

Tiga tahun kemudian, perjanjian tersebut diikuti dengan perjanjian lainnya terkait dengan perbatasan yaitu *Confidence Building Measures* (CBM) di bidang militer sepanjang LAC yang ditandatangani pada 29 November 1996 ketika kunjungan dilakukan oleh Presiden Tiongkok Ziyang Zemin ke India. Dimana bentuk kerjasama ini menjadi suatu penguat dari perjanjian yang telah terbentuk sebelumnya di tahun 1993. Dan dimana dalam perjanjian tersebut dilihat bahwa India dan Tiongkok masih sama-sama memiliki antisipasi yang serius mengenai isu di perbatasan (Das, 2010: 115).

Berlanjut di tahun 2005, saat kunjungan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao, ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berjudul *Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question* yang berisikan parameter yang berisikan prinsip dan panduan bagi antara Pemerintah Republik India dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan antara kedua negara, yang ditandatangani pada 11 April 2005. Kerjasama di antara keduanya masih berlanjut sampai dengan tahun 2012 dimana terbentuknya *Working Mechanism* terkait konsultasi dan koordinasi urusan perbatasan antara India dan Tiongkok. Dimana perjanjian tersebut diimplementasikan dengan berbagai pertemuan dari representatif kedua negara untuk membahas permasalahan perbatasan kedua negara (Das, 2010, hal. 115) dan pertemuan tersebut berlanjut sampai dengan pertemuan terakhir yaitu pertemuan yang ke-9 di antara keduanya dilakukan pada 30-31 Agustus 2016 di New Delhi, India (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016).

Kemudian yang terbaru adalah di tahun 2013 keduanya menandatangani perjanjian

pertahanan di perbatasan dengan perjanjian yang berjudul *Border Defence Cooperation Agreement* yang diinisiasi oleh Tiongkok. Perjanjian tersebut berisikan berbagai poin yang memang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan yang sudah berakar bagi hubungan kedua negara. *Border Defence Cooperation Agreement* merupakan kelanjutan dari beberapa perjanjian yang sudah ditandatangani oleh kedua negara. Dengan beberapa perjanjian yang sudah terbentuk tersebut, dapat dilihat bahwa kedua negara sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan persengketaan permasalahan yang ada.

Terdapat beberapa poin yang berbeda dalam *Border Defence Cooperation Agreement*, sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian di Pasal II yang dimana dalam perjanjian tersebut membahas tentang kerjasama yang dilakukan kedua negara untuk mengatasi isu penyelundupan senjata dan hewan liar beserta dengan kerjasama yang bertujuan untuk memerangi bencana alam maupun penyakit menular yang dapat menyebar dan mempengaruhi sisi di negara lain, selain itu juga di Pasal VI membahas tentang kewajiban dari masing-masing negara untuk tidak mengikuti atau membuntuti patroli yang dilakukan oleh negara lain di perbatasan (Ministry of External Affairs Government of India, 2013) sehingga perjanjian perbatasan ini lebih luas tidak hanya bertujuan untuk menjaga perdamaian dan status quo yang ada di LAC antara kedua negara.

Tetapi, meskipun India telah memutuskan untuk mengikuti perjanjian ini dan beberapa sebelumnya, permasalahan perbatasan antara India dan Tiongkok belum bisa terselesaikan. Permasalahan pun masih terjadi karena mengingat bahwa di satu sisi, India masih berpegang teguh terhadap klaim yang ada di sepanjang perbatasan, yaitu klaim dari Aksai Chin di bagian barat dan Arunachal Pradesh di bagian timur. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor-faktor atau determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India dalam menandatangani perjanjian *Border Defence Cooperation Agreement* (BDCA) dengan Tiongkok tahun 2013 dengan menggunakan

perspektif determinan kebijakan luar negeri milik Howard H. Lentner, yaitu determinan luar negeri dan determinan domestik. Hal tersebut dirasa layak untuk diteliti karena dalam studi hubungan internasional, kebijakan luar negeri menjadi penting. Dengan mengingat bahwa dalam hubungan internasional, negara adalah aktor utama yang menjalankan hak dan wewenangnya untuk melakukan sesuatu hal kepada entitas yang berada di luar negaranya. Selain itu, pembahasan menggunakan determinan dalam kebijakan luar negeri pun penting dikarenakan nantinya akan diketahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan India menandatangani perjanjian BDCA dengan Tiongkok di tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Determinan-Determinan Kebijakan Luar Negeri Menurut Howard H. Lentner dalam Menjelaskan Kebijakan Luar Negeri India Terhadap Penandatanganan BDCA dengan Tiongkok Tahun 2013

Lentner menjelaskan lingkungan eksternal sebagai sesuatu yang bisa memberikan faktor-faktor baik itu bersifat mendesak atau sebagai fasilitator dari setiap kebijakan luar negeri yang dihasilkan suatu negara. Tujuan dari bagian ini adalah menjelaskan bahwa suatu kebijakan luar negeri setiap negara ditentukan oleh kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara lain yang ada di suatu situasi. Dengan begitu, Lentner membagi determinan luar negeri menjadi beberapa bagian, yaitu kategori dari tindakan. Yang pertama adalah tindakan inaksi, yaitu pengasingan yang dilakukan negara lain, meskipun negara tersebut memiliki kepentingan di dalamnya. Kategori kedua adalah tindakan suportif, yaitu pengaplikasian instrumen dan transfer sumber daya yang ditujukan untuk membantu pencapaian tujuan suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah tindakan oposisional, yaitu tindakan yang ditujukan untuk mencegah pencapaian suatu tujuan dari satu negara. Kategori keempat adalah tindakan netral, yang dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk memberhentikan berbagai aktor dari apa yang terjadi dan berupaya untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Dan yang kelima adalah tindakan indusif, yaitu tindakan yang ditujukan untuk membuat satu aktor melakukan sesuatu yang tidak diinginkan (Lentner, 1974:

109-110).

Setelah determinan luar negeri, selanjutnya adalah determinan domestic. Kapasitas dan predisposisi suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Determinan domestik adalah atribut, karakteristik, kondisi serta proses yang bersama-sama dengan determinan luar negeri menjadi penentu dalam suatu tindakan kebijakan luar negeri. Lentner membagi determinan domestik menjadi tiga bagian, yaitu determinan yang sangat stabil (*highly stable determinants*), determinan yang cukup stabil (*moderately stable determinants*), dan determinan yang tidak stabil (*unstable determinants*).

Dalam **determinan yang sangat stabil** (*highly stable determinants*), dipahami sebagai determinan yang tidak terlalu rentan terhadap perubahan, yaitu yang di dalamnya terdiri dari lokasi dan ukuran, populasi, dan sumber daya material. Dengan ukuran geografis yang luas, maka diperlukannya keamanan untuk mengokupasi teritori yang dimiliki. Terkait dengan lokasi, maka menjadi suatu yang penting terkait pembahasan akan hubungan dengan negara-negara tetangganya. Berlanjut ke populasi, berarti membahas tentang kapabilitas dari masyarakat yang ada terkait dengan aspek industrialisasi, pendidikan, sampai dengan teknologi. Dan yang ketiga adalah sumber daya material yang Lentner jelaskan melalui kekayaan ekonomi yang akan menentukan stabilitas suatu negara (Lentner, 1974: 137-143).

Kemudian **determinan yang cukup stabil** (*moderately stable determinants*) dibagi menjadi budaya politik dan gaya nasional, serta kepemimpinan dan proses politik. Budaya politik diartikan sebagai pola dari satu sikap individual serta orientasi terhadap satu sistem politik. Budaya politik juga di dalamnya terdapat nilai-nilai bersama (*common values*), yang dijadikan nilai-nilai bagi keamanan, *well-being*, serta perjuangan bagi kehormatan akan diri sendiri yang tercermin melalui tujuan demi kedaulatan, independen, dan keamanan suatu negara. Selain nilai-nilai bersama juga terdapat rasa takut (*fears*), yang dibagi lagi menjadi rasa takut akan serangan dan disintegrasi, sampai

dengan ketakutan akan kehilangan martabat yang telah dimiliki. Kemudian selain kedua hal tersebut terdapat tujuan-tujuan yang dinyatakan sebagai representasi satu negara akan apa yang diinginkan oleh pemimpin di masa depan (Lentner, 1974: 143-152).

Lebih lanjut terdapat memori, yang menjadi suatu keberlanjutan bagi negara dalam melakukan tindakan kebijakan luar negerinya. Kemudian terdapat sikap, yaitu kondisi dimana suatu kebijakan akan cenderung atau bahkan tidak terjadi ketika ditentukan oleh beberapa faktor. Dan konsep terakhir dalam budaya politik dan gaya nasional adalah persepsi, yang dipahami sebagai suatu cara bagi para elit politik melihat satu kejadian yang akan membantu untuk menentukan bagaimana mereka mendefinisikan permasalahan dan hal tersebut akan menyebabkan pada pembuatan kebijakan suatu negara, klasifikasinya terdiri dari persepsi terhadap ancaman, dan diri sendiri. Kemudian dalam pimpinan dan proses politik, berbicara mengenai suatu sistem politik suatu negara yang didalamnya terdapat para elit politik serta terdiri dari beberapa konstituen seperti birokrasi, publik, serta aktor-aktor NGO (Lentner, 1974: 153-162). Dan yang terakhir adalah **determinan yang tidak stabil** (*unstable determinants*). Yaitu determinan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sehingga lebih kepada psikologis, dan fenomena ketidakseimbangan (Lentner, 1974: 169).

Dalam menjelaskan kebijakan luar negeri India dalam keputusannya menandatangani BDCA dengan Tiongkok di tahun 2013 dapat dimulai dengan menjelaskan masing-masing variabel dari determinan yang ada. Determinan pertama yang dijelaskan adalah determinan luar negeri, dengan melihat tindakan negara lain, dan dalam hal ini adalah Tiongkok. Setiap negara memiliki konstitusi negara yang dijadikan dasar dalam membuat kebijakan, baik domestik maupun luar negeri, dan hal itu pun juga berlaku di Tiongkok. Dalam konstitusinya, Tiongkok menyebutkan bahwa masa depan Tiongkok akan sangat bergantung pada hubungannya dengan dunia secara keseluruhan. Selain itu, dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya, Tiongkok akan bertindak sesuai lima prinsip yaitu saling menghormati masing-masing wilayah dan kedaulatan, tidak melakukan serangan terhadap negara lain, tidak saling mencampuri urusan internal negara lain, saling berperilaku adil dan saling menguntungkan, dan hidup berdampingan

secara damai dengan sama-sama mengembangkan hubungan diplomatik, ekonomi, dan budaya dengan negara-negara lain (Comparative Constitutions Project, 2016). Prinsip tersebut juga muncul dalam hubungan India dan Tiongkok di tahun 1954 dan setelahnya menjadi dasar bagi hubungan kedua negara.

Kemudian dalam membicarakan permasalahan perbatasan antara kedua negara, tindakan Tiongkok di dalamnya tentunya menjadi fokus bagi pihak India dan bagaimana tindakan yang dilakukan Tiongkok mempengaruhi kebijakan luar negerinya India. Eric Hyer, seorang profesor di Universitas Brigham Young, Amerika Serikat dan peneliti yang berfokus pada kebijakan luar negeri Tiongkok, mengatakan dalam bukunya yang berjudul *The Pragmatic Dragon: China's Grand Strategy and Boundary Settlement* bahwa dalam perjanjian ini, yang menjadi inisiator adalah Tiongkok. Dimana draf dari perjanjian tersebut dipresentasikan oleh Beijing pada bulan Maret 2013. Dan setelahnya, penjelasan mengenai perjanjian ini dilakukan pada satu bulan setelahnya, yaitu pada bulan April 2013, pada saat kunjungan PM Li Keqiang ke India. Perjanjian ini pun diharapkan dapat berkontribusi bagi kerjasama antara kedua negara dalam menjaga keamanan dan perdamaian yang ada di sepanjang perbatasan. (Hyer, 2015: 63-64).

Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut, PM Li Keqiang menyatakan pendapatnya bahwa adanya keyakinan bahwa perjanjian BDCA akan berdampak secara positif dalam mempertahankan keadaan yang sudah ada di antara kedua negara di sepanjang perbatasan, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

China and India are two old civilizations, our two peoples have the wisdom and our two governments have the ability to manage our differences along the border so that it won't affect the overall interests of our bilateral relations. I am sure it (the border pact) will help to maintain peace, tranquillity and stability in

our border areas (Li Keqiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China, 2013).

Dengan perjanjian tersebut, maka tindakan Tiongkok akan mengikat pada berbagai pasal yang ada di dalamnya. Tiongkok nantinya akan mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk bisa bekerjasama dengan India untuk menyelesaikan permasalahan penyelundupan serta bencana alam yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan tentunya bersama-sama dengan India untuk menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan demi terciptanya keadaan damai di sepanjang perbatasan. Dr. Pushpita Das, seorang peneliti di *Institute for Defence Studies and Analyses* di New Delhi, mengatakan bahwa India selama ini selalu memiliki keinginan untuk mempertahankan keadaan damai di sepanjang perbatasan. Maka dari itu, dengan ditandatanganinya BDCA di tahun 2013 menjadi satu langkah dalam mencapai keinginan India tersebut. Dengan begitu, maka tindakan Tiongkok sebagai inisiator serta dengan melihat pandangan India terhadap BDCA sebagai hal yang bisa menunjang kepentingan nasional India, maka tindakan Tiongkok dapat dikatakan sebagai tindakan yang suportif bagi keinginan yang dimiliki India.

Setelah determinan luar negeri, pembahasan selanjutnya adalah determinan domestik yang dibagi menjadi tiga jenis. Pertama adalah determinan yang sangat stabil. Di dalam determinan jenis ini terdapat beberapa variabel, sebagaimana yang sudah disebutkan, yaitu ukuran dan lokasi, populasi, dan sumber daya material. Bagi ukuran dan populasi, India memiliki garis perbatasan tanah sepanjang 15,107 km dan garis pantai sepanjang 7,517 km. Geografi India di dalamnya terdapat posisi Kashmir di bagian utara, Kanniyakuram di bagian selatan, Arunachal Pradesh di bagian timur, dan Gujarat di bagian barat (National Council of Educational Research and Training, Government of India, 2006: 1-2).

Selain itu, posisi India juga dikatakan strategis di kawasan Asia Selatan, dengan berada di antara Asia Barat dan Asia Timur. Hubungan antara India dengan dunia telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, dan India memiliki perbatasan tanah dengan Pakistan dan Afghanistan di bagian barat laut, Tiongkok, Nepal, dan Bhutan di bagian utara, dan Myanmar serta Bangladesh di bagian timur India. Selain itu,

di bagian selatan India terdapat dua negara, yaitu Sri Lanka dan Maldives dimana kedua negara tersebut dipisahkan dengan lautan (National Council of Educational Research and Training, Government of India, 2006: 4-5).

Dinyatakan sebelumnya bahwa India berada di posisi yang berada di antara Asia Barat dan Asia Timur. Penelitian ini berfokus pada posisi India yang berbatasan secara langsung dengan negara yang ada di Asia Timur, yaitu Tiongkok. Dengan Tiongkok, India memiliki hubungan yang bisa dikatakan kompleks, dimana jenis hubungan yang ada di antara keduanya dapat dikategorikan dapat berupa kerjasama dan konflik. Dan permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi, yaitu permasalahan perbatasan.

India dan Tiongkok memiliki permasalahan perbatasan di bagian barat yaitu Aksai Chin, dimana area tersebut dikelola oleh Tiongkok tetapi diklaim oleh India sebagai bagian dari Ladakh di Jammu dan Kashmir. Bagi Tiongkok, Aksai Chin menjadi daerah yang penting bagi keterhubungan antara Tibet dan Xinjiang, dan apabila hal tersebut terwujud, maka akan berdampak baik bagi pembangunan regional di Tiongkok karena meningkatnya jumlah pemindahan barang melalui perdagangan dan juga memudahkan pergerakan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut (Aarten, 2013).

Dan di bagian barat adalah Arunachal Pradesh, dikelola oleh India tetapi diklaim oleh Tiongkok sebagai Tibet bagian selatan. Sampai dengan saat ini, Tiongkok memiliki pandangan bahwa India menguasai area di Arunachal Pradesh sebesar 90,000km², dan India di satu sisi memandang Tiongkok menguasai area di Aksai Chin sebesar 38,000 km² (Richards, 2015: 4-5). Bagi India, Arunachal Pradesh memiliki potensi bagi sumber daya hidroelektrik (sumber daya energi air), yang akan bermanfaat bagi persediaan bagi semua pembangkit listrik tenaga air yang ada di India sebesar 41,5%. Di satu sisi, potensial ini juga dilihat oleh Tiongkok (Reeves, 2011: 6)

Kebijakan Luar Negeri India Terkait Isu Perbatasan Melalui Penandatanganan Border Defence Cooperation Agreement Dengan Tiongkok Tahun 2013
(Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, Yoni Yolanda Sinyal)

Dengan luas dan kompleksnya ukuran dan lokasi di perbatasan antara India dan Tiongkok, maka diperlukannya tindakan dari pihak masing-masing negara untuk melakukan keamanan demi menjaga klaim dari teritori yang ada, sebagaimana dinyatakan oleh Lentner bahwa besarnya suatu area dan lokasi akan menjadi faktor suatu negara dalam melakukan tindakan keamanan.

India sendiri sudah membentuk beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menjaga keamanan teritori yang ada di sepanjang perbatasan. Dengan dibentuknya satu departemen khusus yang mengatur perbatasan, terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri India, yaitu Departemen Manajemen Perbatasan. Untuk perbatasan, India menggunakan konsep *one border one force*, yaitu untuk satu area perbatasan akan ditempatkan satu pasukan perbatasan yang berbeda antara satu sama lain. Bagi perbatasan antara India dan Tiongkok dinamakan *Indo-Tibetan Border Police* (ITBP) yang bertujuan dua hal yaitu di satu sisi untuk mengawasi perbatasan antara India dan Tiongkok, serta untuk menjaga keamanan internal bagi teritori yang diklaim oleh India.

Tindakan India dalam menandatangani BDCA pun memiliki tujuan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Drs. Agus R. Rahman, ME., MM di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahwa sebenarnya pada saat permasalahan perbatasan itu muncul, yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan letak perbatasan itu sendiri, tetapi dikarenakan belum adanya persetujuan akan hal tersebut, maka yang dilakukan India adalah mengamankan keadaan area yang dimilikinya, yaitu dengan menandatangani perjanjian BDCA di tahun 2013.

Setelahnya terdapat variabel populasi. Area yang menjadi permasalahan perbatasan antara India dan Tiongkok terletak di bagian Aksai Chin, yang India anggap merupakan bagian dari Ladakh di Jammu dan Kashmir, memiliki populasi 100 sampai 400 jiwa per kilometer persegi memasuki kategori yang kepadatan penduduknya sedang. kependudukan tersebut diakibatkan oleh keadaan agrikultur yang kurang baik, dikarenakan oleh curah hujan yang lebih rendah dan kurangnya air untuk melakukan perairan. Dan untuk area sengketa lainnya adalah Arunachal Pradesh dengan keadaan kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi, dan disebabkan

oleh keadaan tanah yang kasar, curah hujan rendah, atau keadaan iklim yang kurang baik (National Council of Educational Research and Training, Government of India, 2015: 3-8).

Dan variabel terakhir yang dijelaskan dalam determinan ini adalah sumber daya material dengan melihat GDP suatu negara. Berdasarkan informasi di tahun 2013, India terletak di peringkat ke-11 dengan PDB sebesar \$1,84 triliun, sedangkan Tiongkok berada di peringkat ke-3 dengan PDB sebesar \$8,36 triliun (Nation Master). Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa dengan Tiongkok yang memiliki PDB lebih besar maka menjadi suatu keunggulan untuk menunjukkan keberadaannya di sepanjang perbatasan antara India dan Tiongkok, dengan begitu maka Tiongkok dapat melakukan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan India bagian spek militer yang ada di perbatasan.

Determinan selanjutnya adalah determinan yang cukup stabil dengan dibagi menjadi dua bagian yaitu budaya dan gaya politik nasional dan konstituen. Terdapat beberapa variabel dalam budaya dan gaya politik nasional seperti *common values*, rasa takut, tujuan, memori, sikap, dan persepsi. Lentner menganggap bahwa setiap negara memiliki *common values* yang sama, yaitu dilihat dari aspek keamanan. India sampai saat ini masih berpegang teguh dengan klaim atas Aksai Chin dan Arunachal Pradesh. Dan karena masih belum adanya persetujuan yang jelas dari perbatasan, India pun akhirnya menyetujui untuk terlebih dahulu menandatangani perjanjian BDCA, sebagaimana India menyadari bahwa adanya satu isu penting yang perlu diperhatikan bersama, yaitu isu keamanan sehingga disetujui BDCA sebagai suatu langkah untuk lebih mengamankan klaim India yang ada di perbatasan.

Setelah *common value*, variabel selanjutnya adalah rasa takut, dimana Lentner membaginya menjadi rasa takut akan serangan, dan rasa takut akan disintegrasi. Rasa takut juga dimunculkan dengan keadaan adanya suatu kedekatan antara objek dari ketakutan yang muncul dan rasa takut itu sendiri. Neville Maxwell,

seorang jurnalis yang berfokus pada isu perbatasan antara India dan Tiongkok menyatakan dalam jurnalnya yang berjudul *Sino-India Border Dispute Reconsidered* di tahun 1999 bahwa perasaan takut disini muncul sebelum tahun 1962, dimana dengan dibentuknya *Forward Policy* di masa pemerintahan Jawaharlal Nehru yang pada saat itu memiliki posisi sebagai PM India. Dimana kebijakan tersebut ditujukan untuk menghilangkan posisi Tiongkok yang dianggap telah memasuki kawasan teritori yang sudah diklaim oleh India secara ilegal. Dan atas perasaan tersebut, India pun menerapkan suatu kebijakan yang memunculkan perang antara India dan Tiongkok di tahun 1962 silam. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa rasa takut tersebut masa lampau, dimana India masih berada jauh di bawah Tiongkok. Tetapi di zaman ini, India tidak lagi memiliki rasa ketakutan tersebut karena dari sisi India sudah meningkatkan keamanan dari pihak internal dan dengan ditandatangani BDCA dapat berperan bagi keamanan yang lebih baik kedepannya bagi area perbatasan.

Kemudian, setelah rasa takut masuklah ke dalam variabel tujuan. Berbagai tujuan yang diinginkan oleh setiap elit pembuat kebijakan luar negeri terkadang bisa bersifat kompleks ataupun sederhana. Tujuan dalam kebijakan luar negeri menurut Lentner didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan satu situasi tertentu dan merepresentasikan dari keadaan yang diinginkan oleh para pemimpin suatu negara di masa depan (Lentner, 1974: 151).

Tujuan yang ingin dicapai oleh India dengan melakukan BDCA adalah keinginan mengurangi tensi yang ada di perbatasan, dikarenakan tensi tersebut bisa menjadi penghambat bagi hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, tujuannya adalah untuk membentuk rasa saling percaya antara kedua negara, yang nantinya akan menjadi penjamin di masa depan bahwa permasalahan perbatasan akan diselesaikan dengan cara damai. Tetapi apabila melihat ke dalam isi perjanjian, di bagian pembukaan disebutkan bahwa *Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity* dijadikan sebagai hal yang fundamental bagi memenuhi kebutuhan yang ada di masing-masing negara. Serta ditegaskan mengenai keberadaan militer yang dimiliki masing-masing negara dan penggunaan militernya untuk tidak menjadi suatu ancaman

dan tidak diperkenankan untuk saling menyerang terhadap satu sama lain dan secara umum di dalam perjanjian ini juga disetujui bahwa keadaan damai serta stabilitas masih dibutuhkan oleh masing-masing negara. Sebagaimana disebutkan di dalam *Joint Statement*:

Agreed that broadening and deepening of defense exchanges between the two countries was of vital importance in enhancing mutual trust and understanding between the two armed forces, and to ensuring a peaceful environment in which they could pursue their respective national development objectives (India-China Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity, 2005).

Lebih lanjut, terdapat beberapa pembeda antara BDCA dengan beberapa perjanjian yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh India dan Tiongkok. Pembeda yang secara signifikan disebutkan perjanjian ini adalah bagaimana kedua negara menyetujui untuk di masa depan melakukan kerjasama untuk melawan isu penyelundupan dari senjata, maupun hewan liar. Hal itu disebabkan karena diketahui di poros perbatasan India di bagian timur laut yaitu yang membatasi Myanmar dan Tiongkok, telah lama menjadi tempat bagi perburuan satwa liar dan penyelundupan senjata, narkoba, maupun satwa liar. (Das B., 2014: 37).

Kemudian dilanjutkan dengan kerjasama antara India dan Tiongkok dalam hal bencana alam atau penyakit yang sifatnya menular. Dimana implementasi tindakan ini disebut di Pasal II perjanjian. Setelah itu, perjanjian ini juga membahas perihal tidak diizinkan untuk melakukan pembuntutan terhadap patroli yang dilakukan oleh pihak lain. Bijoy Das, selaku peneliti di *Institute for Defence Studies and Analyses* menyatakan bahwa persetujuan tersebut diadakan karena adanya kesepakatan pemahaman bahwa hal tersebut dapat meningkatkan tensi, maka baik dari India

dan Tiongkok menyetujui untuk tidak mengikuti atau membuntuti patroli dari pihak lain sebagaimana disebutkan di Pasal VI. Kesepakatan tersebut juga didasari oleh pemahaman bahwa perdamaian dan ketenangan yang ada di perbatasan menjadi hal yang penting bagi hubungan bilateral kedua negara dan militer dari masing-masing negara juga perlu meningkatkan rasa saling percaya antara satu sama lain (Das, 2014: 40).

Selain tujuan tersebut terdapat tujuan lain yang ingin dicapai oleh India, yaitu ekonomi, dengan begitu tujuan yang ingin dicapai India beragam. Dimana di satu sisi tujuan yang ingin dicapai adalah keamanan, sebagaimana terlihat dari judul dan berbagai pasal di dalamnya. Dan dengan pertahanan yang menjadi hal pokok dalam perjanjian ini, maka tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak militer baik dari India dan Tiongkok lah yang secara spesifik dibicarakan. Kemudian selain keamanan, ternyata terdapat tujuan lain yang ingin dicapai oleh India, yaitu ekonomi. Meskipun dalam perjanjian ini tidak secara spesifik membahas tentang ekonomi, India di satu sisi menyadari bahwa dengan terjalinnya hubungan yang harmonis di perbatasan akan memiliki dampak bagi hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam aspek ekonomi, sebagaimana tujuan BDCA secara umum adalah untuk mempertahankan keadaan damai yang ada di sepanjang perbatasan, dan perjanjian ini juga menjadi langkah kedua negara untuk bisa lebih membangun kepercayaan, terutama antara militer satu sama lain.

Selanjutnya terdapat variabel memori, yang memberikan suatu sifat keberlanjutan dari berbagai kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, memori juga menjadi salah satu sarana dalam kebijakan luar negeri, yang digunakan untuk beradaptasi di suatu kondisi, untuk melakukan hubungan dengan lain, dan untuk melakukan respon terhadap inisiasi yang dibuat oleh negara lain (Lentner, 1974: 153-154). India sampai saat ini masih memiliki ingatan tentang permasalahan mengenai perang yang terjadi di tahun 1962 silam. Dimana, terlihat dari pernyataan Dr. Manmohan Singh:

India and China have historical issues and there are areas of concern. The two governments are addressing them with sincerity and maturity, without letting them affect the overall atmosphere of friendship and

cooperation (Dr. Manmohan Singh, Former PM of India, 2013).

Dengan begitu, ingatan tentang kekalahan yang dialami India menjadi pelajaran tersendiri untuk meningkatkan kemampuan militer yang ada di perbatasan, dengan tujuan untuk mempertahankan klaim yang sudah dinyatakan secara tegas oleh India. Dan keputusan India untuk menandatangani BDCA juga menjadi pembelajaran bagi India untuk tidak menerapkan kebijakan yang merujuk kepada kekerasan perihal permasalahan perbatasan dengan Tiongkok, melainkan dapat diatasi dengan pendekatan diplomatik antara perwakilan masing-masing negara.

Sikap kemudian menjadi variabel selanjutnya, yang dijelaskan sebagai suatu kondisi yang akan terjadi apabila kebijakan itu terbentuk. Sikap yang diberikan oleh pemerintah India pada saat itu, dapat terlihat dari pernyataan Dr. Manmohan Singh, yang pada saat itu menjabat sebagai PM India:

India and China are two civilizational neighbours and have lived in peace through the ages. We have had our differences in more recent times, but over the last 25 years, we have steadily built a mutually beneficial relationship. The basis for continued growth and expansion of our ties is peace and tranquility on our borders. While seeking an early resolution of the boundary question, Premier Li and I agreed that this must continue to be preserved (Dr. Manmohan Singh, Former PM of India, 2013).

India dalam kebijakan luar negerinya selalu menyongsong nilai-nilai perdamaian demi terciptanya hubungan yang baik dengan negara-negara tetangganya. Dan hal tersebut pun terlihat dengan sikap baik India dalam merespon BDCA. Berdasarkan hal tersebut, maka sikap yang ditunjukkan India dapat dikategorikan sebagai tindakan yang *trusting* atau sikap percaya. Selain itu adanya sikap keterbukaan. Dalam sikap seperti ini, perjanjian BDCA juga ditujukan

untuk meningkatkan kepercayaan antara kedua negara.

Dan variabel terakhir yang menjadi bagian dari budaya politik dan gaya nasional adalah persepsi, yang dipahami sebagai bagaimana pandangan elit terhadap suatu hal yang kemudian membantunya dalam mendefinisikan permasalahan yang ada (Lentner, 1974, hal. 156). Pertama, yaitu persepsi terhadap ancaman. Diawali dari tahun 1950-an, India sudah merasakan ancaman yang jelas dari kehadiran Tiongkok, yang dianggap secara ilegal ke dalam teritori yang diklaim oleh India, sehingga dibentuklah *forward policy* pada saat pemerintahan Jawaharlal Nehru berlangsung. Dimana kebijakan tersebut pun berdampak pada perang yang terjadi dan hubungan yang merenggang antara India dan Tiongkok. Persepsi ancaman, memiliki keterkaitan dengan rasa takut. Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa di abad ke-21 ini, India tidak merasa suatu ancaman maupun rasa takut terhadap Tiongkok perihal perbatasan di antara keduanya.

Yang kedua adalah persepsi terhadap diri sendiri. Setelah itu terdapat perspektif terhadap diri sendiri menjadi. Dr. Rajeswari Pillai Rajagopalan dan Rahul Prakash, selaku peneliti di *Observer Research Foundation* (ORF) di New Delhi, India dalam artikelnya yang berjudul *Sino-Indian Border Infrastructure: An Update* di tahun 2013 menyatakan bahwa dibandingkan dengan Tiongkok, kehadiran dan tindakan India di perbatasan terkait pembangunan infrastruktur seperti jalan dapat dikatakan lambat, dikarenakan permasalahan seperti administrasi yang tertunda, kurangnya sumber daya manusia, mesin, sampai dengan biaya yang digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada (Rajagopalan & Prakash, 2013: 14). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa apabila dibandingkan dengan Tiongkok, kinerja India di perbatasan cukup tertinggal. Dan dengan begitu, berdampak pada keamanan yang kurang sehingga dengan ditandatanganinya BDCA dapat diharapkan keamanan di perbatasan dapat meningkat, dengan mengingat di satu sisi untuk saling menghargai wilayah dan teritori satu sama lain terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh masing-masing negara untuk tidak menerobos daerah yang menjadi sengketa di antara India dan Tiongkok.

Setelahnya terdapat kepemimpinan dan

proses politik, yang di dalamnya membahas konstituen Konstituen dalam determinan kebijakan luar negeri dibagi menjadi tiga bagian yaitu, elit politik, birokrasi, dan publik serta aktor-aktor *non-governmental* (NGO). Beberapa elit politik yang ikut andil dalam keputusan India untuk melakukan penandatanganan BDCA adalah Perdana Menteri India saat itu, Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh merupakan bagian dari partai politik *Indian National Congress* (INC), dengan demokrasi sosial sebagai nilai politiknya dan merupakan bagian dari koalisi *United Progressive Alliance* (UPA), dimana perhatian dari koalisi ini adalah Tiongkok dan Pakistan (Elections in India, 2015).

Lebih lanjut, elit politik yang juga memiliki peran dalam keputusan India menandatangani BDCA adalah Menteri Pertahanan. Kemudian dalam membicarakan birokrasi serta publik, kedua variabel tersebut bersikap suportif dalam menanggapi keputusan India dalam menandatangani BDCA dengan Tiongkok, dukungan tersebut dikarenakan masyarakat India berada di posisi dimana mempercayai pemerintahannya apabila terkait kebijakan luar negerinya.

Hal tersebut juga terlihat dalam karakteristik hubungan antara konstituen dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. Lentner menyatakan bahwa dengan sistem pemerintahan yang parlemen, maka birokrasi akan bersikap suportif (*supportive*), dan publik serta aktor NGO akan menghormati (*deferential*) terhadap keputusan yang telah dibuat (Lentner, 1974: 164).

Pembahasan terakhir adalah determinan yang tidak stabil, yang di dalamnya terdapat variabel faktor psikologis dan sesuatu hal yang aksidental. Berdasarkan keputusan India dalam menyetujui dan menandatangani perjanjian BDCA, tidak terdapat faktor psikologi yang cukup signifikan yang menjadi alasan di balik persetujuan India tersebut. Dr. Pushpita Das juga mengatakan demikian, dilihat dari pernyataannya yang menunjukkan bahwa keputusan India untuk menandatangani BDCA sudah berdasarkan perhitungan yang cukup. Tetapi di satu sisi, selama

dilakukannya negosiasi untuk perjanjian BDCA, terdapat suatu insiden yang muncul bagi hubungan kedua negara. Insiden yang terjadi adalah insiden Depsang, yang terjadi pada bulan April sampai dengan Mei di tahun 2013. Dimana peristiwa tersebut menjelaskan tentang kemunculan tentara Tiongkok, *People's Liberation Army* (PLA) di daerah Depsang yang lebih tepatnya di bagian Aksai Chin yang menjadi tempat dari permasalahan perbatasan antara India dan Tiongkok di wilayah barat (Das, 2014: 39).

Signifikansi Determinan dan Kebijakan Luar Negeri dalam Menandatangani BDCA dengan Tiongkok

Setelah penjelasan dari beberapa determinan kebijakan luar negeri, di sub bagian ini akan menjelaskan bagaimana masing-masing determinan tersebut memiliki signifikansi dan keterhubungan dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh India, yaitu keputusan untuk menandatangani *Border Defence Cooperation Agreement* (BDCA) dengan Tiongkok di tahun 2013.

Dalam determinan luar negeri, dapat dijelaskan bahwa tindakan Tiongkok sebagai inisiator perjanjian dan memiliki suatu keterhubungan dengan kebijakan luar negeri yang diambil India, yaitu untuk menandatangani BDCA. Dikarenakan dengan munculnya perjanjian ini maka kebutuhan India untuk mempertahankan perdamaian yang ada di sepanjang perbatasan pun akan terpenuhi.

Selain determinan luar negeri, terdapat determinan domestik yang didalamnya terbagi menjadi determinan yang sangat stabil, determinan yang cukup stabil, dan determinan yang tidak stabil. Bagi determinan yang sangat stabil, terdapat beberapa variabel. Dan variabel yang pertama adalah ukuran dan lokasi, dengan melihat permasalahan perbatasan yang memang didasari oleh letak dan panjang dari garis perbatasan yang jelas antara kedua negara, dan ditambahnya kebutuhan dari keamanan yang di area tersebut, maka determinan ukuran dan lokasi ini memiliki suatu keterhubungan dengan kebijakan luar negeri yang diambil India untuk menandatangani BDCA dengan Tiongkok.

Kemudian variabel selanjutnya adalah populasi. Permasalahan pokok antara India dan Tiongkok terletak pada garis serta posisi perbatasan yang jelas antara keduanya, maka dengan begitu peneliti melihat bahwa tidak

ditemukannya keterhubungan antara populasi dengan keputusan India untuk melakukan penandatanganan BDCA dengan Tiongkok, sebagaimana perjanjian ini memfokuskan pada kebutuhan dari India untuk mengamankan klaim yang ada di Akasai Chin dan Arunachal Pradesh.

Sumber daya material menjadi variabel terakhir yang ada di kategori determinan yang sangat stabil. Peneliti melihat bahwa variabel ini memiliki suatu keterhubungan dengan keputusan India untuk menandatangani BDCA. Dengan melihat bahwa posisi PDB India yang berada di bawah Tiongkok, maka berdampak pada ketidakmampuan India untuk menyebarkan kemampuan militernya di sepanjang area perbatasannya dengan Tiongkok. Karena hal tersebut peneliti melihat bahwa India memiliki suatu kesadaran untuk tidak melakukan serangan kepada Tiongkok, melainkan untuk melakukan kerjasama yang nantinya akan mendukung kebutuhan India, yaitu keamanan di perbatasan.

Setelah determinan yang sangat stabil, selanjutnya terdapat determinan yang cukup stabil. *Common values* menjadi variabel pertama di kategori ini, dan telah dijelaskan bahwa keamanan menjadi nilai bersama yang diinginkan oleh semua negara termasuk India, dan dengan ditandatanganinya BDCA maka diharapkan keadaan perbatasan antara kedua negara akan menjadi lebih aman sebagaimana perjanjian ini ditujukan untuk lebih meningkatkan kepercayaan antara militer yang dimiliki masing-masing negara. Dan berdasarkan hal tersebut maka variabel ini pun memiliki keterhubungan dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan India untuk menandatangani BDCA.

Kemudian rasa takut menjadi variabel selanjutnya. Berdasarkan studi pustaka dan wawancara yang telah dilakukan peneliti disebutkan bahwa rasa takut bukanlah menjadi suatu alasan dibalik keputusan untuk menandatangani BDCA dengan Tiongkok. Melainkan perihal isu perbatasan dengan Tiongkok ini adalah sesuatu yang penting dan karenanya India menaruh perhatian di dalamnya. Dengan peneliti melihat bahwa rasa takut tidak memiliki suatu keterhubungan yang

signifikan dengan keputusan India dalam menandatangani BDCA.

Setelahnya terdapat variabel tujuan. Variabel ini tentunya memiliki keterhubungan dengan kebijakan luar negeri India dalam menandatangani BDCA, dengan mengingat bahwa setiap kebijakan luar negeri yang dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dimana tujuan India dibagi menjadi dua aspek yaitu keamanan dan ekonomi.

Variabel selanjutnya adalah memori. India memiliki memori tersendiri pada saat membicarakan permasalahan perbatasan dengan Tiongkok, dan memori ini memiliki keterhubungan dengan kebijakan luar negeri India dalam menandatangani BDCA dengan Tiongkok. Kedua negara menjadi lawan bagi satu sama lain selama perang yang terjadi di tahun 1962 silam, dan India mengalami kekalahan di dalamnya. Berdasarkan sejarah, perang tersebut diakibatkan oleh *forward policy* yang diterapkan oleh India ditahun 1960-an dan kekalahan yang dialami India diakibatkan oleh kurangnya perhatian India terhadap militer yang dimilikinya. Dan dengan begitu memori tersebut menjadi pelajaran tersendiri bagi India untuk tidak menerapkan kebijakan yang merujuk kepada kekerasan perihal permasalahan perbatasan dengan Tiongkok, dan untuk meningkatkan kemampuan militer yang ada di perbatasan, dengan tujuan untuk mempertahankan klaim India.

Selanjutnya terdapat sikap. Determinan ini menjelaskan bahwa India dalam kebijakan luar negerinya yang menyongsong nilai-nilai perdamaian pun terlihat dengan sikap India yang terbuka dengan proposal BDCA yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga ditandatangani perjanjian ini di tahun 2013. Dengan begitu sikap India tersebut memiliki keterhubungan dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan India.

Dan persepsi menjadi variabel terakhir dalam kategori determinan yang cukup stabil. Persepsi ini terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu persepsi terhadap ancaman, terhadap dinamika dan struktur sistem, serta terhadap diri sendiri. Untuk persepsi terhadap rasa ancaman, variabel ini memiliki keterkaitan dengan variabel rasa takut, dan dengan begitu peneliti melihat bahwa tidak adanya suatu keterhubungan yang signifikan antara persepsi ini dengan keputusan India dalam menandatangani BDCA.

Persepsi terhadap diri sendiri menjadi

sesuatu yang dianalisis. Hal ini membicarakan bahwa dari hasil beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam membicarakan kemampuan dan kehadiran militer di sepanjang area yang menjadi permasalahan perbatasan, India dikatakan lambat sehingga posisinya berada di bawah Tiongkok. Dengan begitu maka India memiliki suatu kesadaran akan kapabilitas yang dimilikinya, dan diputuskanlah untuk melakukan kerjasama yang nantinya akan mendukung kebutuhan India, yaitu keamanan di perbatasan, dimana keputusan tersebut melalui penandatanganan BDCA.

Variabel terakhir yang dianalisis dalam kategori determinan yang cukup stabil, dan dilihat sebagai sesuatu yang memiliki signifikansi dengan keputusan India untuk menandatangani BDCA adalah konstituen. Sebagaimana variabel ini membahas tentang bagaimana elit politik mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Dr. Manmohan Singh serta koalisi partai yang diikutinya, *United Progressive Alliance* yang memiliki perhatian terhadap hubungan Tiongkok dan Pakistan menyebabkan India untuk menandatangani BDCA, yang nantinya ditujukan untuk lebih mengikat hubungan dan kepercayaan kedua negara demi terciptanya keamanan dan perdamaian yang ada di sepanjang perbatasan.

Setelah determinan yang cukup stabil, terdapat determinan yang tidak stabil. Variabel pertama yang dibahas adalah faktor psikologis seperti emosional, dan variabel ini tidak memiliki signifikansi dikarenakan dalam prosesnya tidak terdapat suatu perasaan emosional maupun psikologis lainnya, dan keputusan India untuk menandatangani BDCA adalah sesuatu yang melalui perhitungan yang cukup. Dan variabel terakhir yang diteliti adalah kejadian yang bersifat aksidental. Selama proses negosiasi yang dilakukan India dengan Tiongkok, terdapat insiden Depsang, yaitu terleta di perbatasan bagian barat. Dengan ditandatanganinya BDCA, maka terdapat harapan untuk dapat lebih mengurangi tensi antara kedua perbatasan sehingga insiden seperti itu tidak lagi terjadi.

SIMPULAN

Dengan demikian artikel ini menyimpulkan bahwasanya pada isu ini, determinan domestik merupakan variabel yang masih signifikan bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini terlihat dalam keputusan India untuk menandatangani BDCA dengan Tiongkok.

Setidaknya setiap determinan memiliki dampak yang variatif terhadap pertimbangan India memutuskan menandatangani BDCA mulai dari kapasitas India, persepsi ancaman dan peluang terhadap Tiongkok serta pertimbangan status quo politik domestik di India. Selain itu, beberapa pertimbangan lain seperti stabilitas keamanan di area perbatasan juga menjadi pertimbangan bagi India dalam mempertahankan kebijakan luar negerinya yang kompromistis terhadap Tiongkok melalui penandatanganan BDCA.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarten, S. R. (2013, June 10). Sino-Indian Relations: The Geopolitics of Aksai Chin. Retrieved May 25, 2017, from Geopolitical Monitor: <https://www.geopoliticalmonitor.com/sino-indian-relations-the-geopolitics-of-aksai-chin-4822/>
- Comparative Constitutions Project. (2016). China's Constitution of 1982 with Amendments through 2004. Comparative Constitutions Project.
- Das, P. (2010). India's Border Management: Select Documents. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses.
- Elections in India. (2015, January 28). *Indian National Congress*. Retrieved May 24, 2017, from <http://www.elections.in/political-parties-in-india/indian-national-congress.html>
- Hyer, E. (2015). *The Pragmatic Dragon: China's Grand Strategy and Boundary Settlement*. Canada: UBC Press.
- Lentner, H. H. (1974). *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach* (1st ed.). Columbus, Ohio: Bell & Howell Company.
- Li, Z. (2010). *China-India Relations: Strategic Engagement and Challenges*. Center for Asean Studies, 10.
- Malone, D. M., & Mukherjee, R. (2010). India and China: Conflict and Cooperation. *Survival: International Institute for Strategic Studies' Journal*, 52, 137-158.
- Ministry of External Affairs Government of India. (2013). Bilateral/Multilateral Documents. Retrieved 11, 2017, from <http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/22366/Agreement+between+the+Government+of+the+Republic+of+India+and+the+Government+of+the+Peoples+Republic+of+China+on+Border+Defence+Cooperation>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2016). Home: MFA News. Retrieved January 11, 2017, from http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1395422.shtml
- Ministry of Home Affairs Government of India. (2016, January 14). Home: Border Division Agreement. Retrieved January 15, 2017, from http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/BMIntro-1011.pdf
- National Council of Educational Research and Training, Government of India. (2006). *Social Science: Contemporary India*. New Delhi: Chandra Prabhu Offset Printing Works.
- National Council of Educational Research and Training, Government of India. (2015). *Population: Distribution, Density, Growth, and Composition*. In *India: People and Economy* (pp. 1-14). New Delhi: Publication Division by National Council of Educational Research and Training, Government of India.
- Nation Master. (n.d.). Country vs Country: China and India compared: Economy stats. Retrieved May 25, 2017, from <http://www.nationmaster.com/country-info/compare/China/India/Economy#2012>
- Pardesi, M. S. (2012). The Legacy of 1962 and China's Indian Policy. *Journal of*

- Defense Studies, 6(4), 190-191.
- Rajagopalan, R. P., & Prakash, R. (2013). Sino-Indian Border Infrastructure: An Update. ORF Occasional Paper, 1-26.
- Reeves, J. (2011). Arunachal Pradesh: A Crux of Sino-Indian Rivalry. *Small Wars Journal*, 1-12.
- Richards, K. (2015). China-India: An Analysis of the Himalayan Territorial Dispute. *Indo-Pacific Strategic Papers*.
- Sharma, V., & Ghildial, A. K. (2014). Relevancy of Five Principles of Peaceful Coexistence (Panchsheel) in Post Cold War Era. *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(5), 60.
- SPR Buildtech. (2013). Retrieved March 27, 2017, from <http://www.sprbuildtech.com/blog/world-top-5-countries-longest-border/>
- Zhang, H., & Li, M. (2013). Retrieved December 4, 2016, from http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf